

ASIRI Ancam Laporkan YKCI

**ASIRI (Asosiasi Industri Rekaman Indonesia) berencana mengambil langkah hukum terhadap Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI), apabila tidak mengindahkan somasi yang dilayangkan secara terbuka melalui Surat Kabar *Kompas*, tertanggal 10 Juli 2006.** "Kami tentunya akan mengambil langkah hukum apabila mereka tak menanggapi somasi dari pihak ASIRI," kata Otto Hasibuan, kuasa hukum ASIRI, kepada pers di Jakarta, Kamis (13/7).

Langkah somasi yang dilakukan ASIRI berkait dengan langkah YKCI yang telah bertindak seolah-olah sebagai lembaga publik, yang memiliki legitimasi untuk melakukan penagihan atau pemungutan royalti atas pemakaian produk rekaman suara milik atau yang berasal dari anggota ASIRI.

Menurut Otto langkah yang diambil YKCI dengan menagih royalti merupakan tindakan yang tak sah mengingat tak satu pasalpun di dalam undang-undang hak cipta no 19/2000, yang memberikan kewenangan kepada YKCI untuk menagih atau memungut royalti dari semua pihak yang memakai atau mengumumkan produk rekaman suara milik atau yang berasal dari anggota ASIRI. "YKCI tak punya hak memungut royalti dari toko-toko atau bahkan perusahaan-perusahaan telekomunikasi," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua ASIRI Arnel Afandi mengatakan, kegiatan yang dilakukan YKCI sudah sangat jauh dari kewenangan yang selama ini ada. Menurutnya, YKCI sebagai *collecting society* memang dapat melakukan pemungutan royalti. Hanya saja, ruang geraknya berdasarkan kuasa yang diberikan sejumlah pencipta lagu. "Dan terbatas pada lagu-lagu ciptaan pencipta lagu yang memberi kuasa kepada YKCI. Belakangan YKCI justru tampil sebagai lembaga publik yang merasa punya hak atas semua itu. Ini yang tidak bisa kami terima," katanya.

Padahal, lanjut Arnel, tak ada undang-undang hak cipta yang mengatur bahwa YKCI adalah lembaga publik. "Di Bali ada toko yang tak boleh memutar lagu kalau tak memiliki lisensi dari YKCI. Bahkan hal itu dilakukan dengan ancaman. Ini tidak benar," tegas Arnel.

Langkah yang diambil YKCI, kata Arnel, dikhawatirkan justru akan mengancam kelangsungan industri musik tanah air. "Bisa dibayangkan berapa kerugian yang akan dialami jika hotel, restoran atau perusahaan telekomunikasi *enggan* memutar lagu. Yang kasihan justru para pencipta lagu," katanya.

Upaya untuk meluruskan masalah ini sudah pernah dilakukan. Arnel mengaku pihaknya sudah melakukan pertemuan secara formal dengan Ketua Umum YKCI Munif Bahaswan dan sejumlah pejabat teras lainnya untuk membahas masalah ini. Tapi rupanya pertemuan itu tak menemukan titik temu. Hingga akhirnya langkah somasi pun dilakukan.

Dihubungi terpisah, Sekjen YKCI Ireng Maulana belum bersedia memberikan komentar lebih jauh mengenai masalah ini. "Kita masih melihat keadaan. Saya hanya bingung saja, ini maunya apa. Kita sudah 15 tahun *kok* justru muncul masalah seperti ini. Satu atau dua minggu kita baru akan bersikap," katanya saat dihubungi *KCM*.

Ireng hanya menyesalkan munculnya masalah ini. Menurutnya, munculnya masalah ini justru akan menimbulkan kebingungan di masyarakat. "Kasihan masyarakat luas yang tak mengerti masalah ini. Mereka jadi bingung. Ini masalah yang tak perlu dibesar-besarkan. Kita bisa duduk *bareng*," katanya

